

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pun semakin luas. Kebutuhan akan pelayanan berbasis teknologi informasi dirasa sangat diperlukan di berbagai bidang, tidak terkecuali didalam sistem pemerintahan. Dengan perkembangan teknologi informasi, permasalahan seperti pendataan manual yang kerap ditemui dalam instansi pemerintahan dapat diselesaikan dengan solusisolusi yang lebih inovatif. Pemanfaatan teknologi guna mengatasi masalah yang kerap ditemukan belum diterapkan merata ke seluruh organisasi di Indonesia, khususnya instansi pemerintahan. Instansi pemerintah yang merupakan wadah bagi masyarakat dalam segala permasalahan kewarganegaraan diharapkan memiliki sumber daya yang memadai guna memfasilitasi warganya. Dalam penerapannya, di perlukan suatu teknologi baru yang dapat digunakan untuk memenuhi informasi yang efektif bagi masyarakat tanpa mengindahkan kenyamanan pelayanan hanya dengan sistem yang sederhana.

Dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 disebutkan terdapat beberapa metode untuk mendapatkan barang atau jasa dalam instansi pemerintah. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dapat dilakukan dengan swakelola, pelelangan, penunjukan langsung, seleksi, kontes, sayembara dan pengadaan langsung. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi dapat mendirikan unit tersendiri yang melaksanakan pengadaan barang atau jasa. Unit tersebut adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.

Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (penunjukan langsung) khususnya personal komputer atau laptop terdapat kendala, antara lain pembuatan dokumen yang digunakan untuk pengadaan barang langsung pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah masih manual menggunakan aplikasi pengolah angka (*Ms. Excel*). Hal tersebut memungkinkan pembuatan dokumen pengadaan barang langsung menjadi lambat. Pendataan dokumen pengadaan barang langsung khususnya personal komputer atau laptop masih tersip dalam lembaran kertas. Hal ini dinilai kurang efektif dan efisien karena memungkinkan dokumen tersebut hilang atau rusak. Kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (penunjukan langsung) khususnya personal komputer atau laptop belum menggunakan teknologi basis data sehingga kurang efektif dalam pencarian data apabila data tersebut dibutuhkan

Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah perlu mengembangkan sistem informasi pengadaan barang penunjukan langsung yang diakses secara internal yang memudahkan bidang bendahara keuangan dalam melakukan pengadaan barang penunjukan langsung khususnya personal komputer atau laptop. Belum adanya sistem informasi pengadaan barang langsung khususnya personal komputer atau laptop mengakibatkan pemborosan waktu dan biaya akibat dari sistem yang tidak memiliki fitur-fitur dan fungsionalitas yang bermanfaat dan sesuai. Suatu sistem informasi yang dibuat harus efektif dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu Sistem Informasi pengadaan barang langsung ini juga akan diuji kelayakan agar sistem terjamin kualitasnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pada penelitian ini penulis membangun sistem perancangan yang akan diimplementasikan dalam penelitian

berikut “Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah Studi Kasus Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah” karena penggunaan dan cara aksesnya yang begitu mudah sehingga sangat efektif untuk membantu mengelola pengadaan barang langsung pada lingkup pemerintahan untuk menunjang kelancaran bidang Bendahara Keuangan pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah maka dapat diuraikan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengembangkan Sistem Informasi pengadaan langsung barang pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana penerapan Pengembangan Sistem Informasi pengadaan langsung barang pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah menghasilkan informasi yang efektif?
Bagaimana memenuhi kebutuhan informasi untuk mengoptimalkan kerja bendahara keuangan dalam pengadaan langsung barang pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi ruang lingkup masalah Pengembangan Sistem Informasi pengadaan langsung barang pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah, antara lain:

1. Pendataan Rekanan atau Pihak Ketiga
2. Pendataan SPK
3. Pembuatan SPM
4. Pendataan SP2D
5. Pendataan Berita Acara Pembayaran, Pemeriksaan, dan Tanda Terima Barang

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan secara keseluruhan adalah dengan menggunakan metode SDLC dimana salah satu metode yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode waterfall model

1.5 Penelitian Terdahulu

1. Hafid M. N. (2018), **Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pengadaan Langsung Dengan Agile Unified Proses**, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit Layanan Pengadaan (ULP) merupakan salah satu unit yang bertugas menangani pengadaan di Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi. Seluruh proses pengadaan barang dan jasa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ditangani oleh Unit Layanan Pengadaan. Selama ini proses pengadaan sudah dilakukan secara semi manual, namun demikian banyaknya jadwal pengadaan pada waktu yang sama menyebabkan terjadinya antrian pengadaan serta perubahan jadwal secara mendadak. Oleh karena itu maka dibangun sistem informasi pengadaan untuk jenis pengadaan langsung. Agile Unified Process diterapkan dalam pembangunan sistem ini, dengan melakukan 4 tahapan inti yaitu Inception, Elaboration, Construction, dan Transition. Berdasarkan dari acceptance test dari user rekanan maupun ULP menyatakan bahwa proses bisnis yang berjalan telah sesuai dengan nilai rata rata sebesar 32 % setuju, 29 % netral, 27% sangat setuju, 8 % kurang setuju.

2. Ekaputra D. A (2016), **Pelaksanaan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta**, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung. Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara terkait dengan Pengadaan barang/jasa milik daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota No 65 Tahun 2015. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah Khususnya di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta menjadi penting dikarenakan berdasarkan RKPA-SPKD menunjukkan bahwa penganggaran dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tahun 2015 merupakan salah satu yang terbesar di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta sehingga penting untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui metode penunjukan langsung di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan empiris yuridis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber serta pengolahan data terhadap data-data yang berkaitan dengan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah. Dalam penelitian menggunakan teori asas-asas umum pemerintah yang layak, teori negara hukum, serta teori otonomi daerah. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah di Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah Kota Yogyakarta dalam mekanisme pengadaan langsung barang/jasa pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang terjadi antara lain kurangnya SDM yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, serta kurangnya koordinasi baik antar seksi maupun antar bidang dalam perencanaan pengadaan barang/jasa serta belum maksimalnya *website* pemerintah kota Yogyakarta sehingga akses efektifitas dan akuntabel belum dapat dilaksanakan dengan maksimal.

3. Nur Ilmi Faisal N. I., Morasa J., Mawikere L. M. (2017), **Analisis Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (Penunjukan Langsung) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Desentralisasi Pemerintahan atau Otonomi Daerah adalah sebuah bentuk Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik dan

bersistem. Organisasi publik dalam hal ini birokrasi Pemerintahan sebagai *stakeholders* seharusnya memiliki rasa kepekaan terhadap kepentingan dan permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan. Birokrasi juga dituntut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya dan tidak melaksanakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan melampaui batas kewenangannya. Dengan ini akan tercipta bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah. Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kegiatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (penunjukan Langsung) khususnya Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado sudah sesuai apa belum ? Dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu “Untuk menganalisis memadai tidaknya sistem pengadaan barang dan jasa (Penunjukan Langsung) khususnya Mobil Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado.

1.6 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dituliskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah yang dapat mendukung kelancaran pengadaan barang langsung.

2. Menjamin kualitas Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah agar sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun manfaat dari pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah ini diharapkan dapat meningkatkan pengadaan barang langsung agar dapat dikontrol dengan baik.
2. Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah ini dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya yang dapat dikembangkan kembali nantinya.
3. Mempermudah pengelolaan dokumen Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.
 1. Mempermudah dalam pembuatan Pengadaan Langsung Barang Pemerintah pada Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tengah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sesuai dengan batasan masalah dan agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistem informasi kepegawaian ini, penulis menyusun skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori umum dan khusus yang berhubungan dengan judul skripsi yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang Metode waterfall model ini bisa disebut juga dengan *clasic life cycle*. Metode ini membutuhkan pendekatan sistematis dan sekuensial dalam pengembangan perangkat lunak , dimulai dari tingkat sistem dan kemajuan mulai analisis, pengkodean, pengetesan dan pemeliharaan. Waterfall model merupakan metode yang penulis gunakan dalam semua proses pembuatan skripsi ini

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI

Bab ini berisi antara lain: Struktur Organisasi, jabaran tugas dan wewenang, analisis masalah sistem berjalan, analisis hasil solusi, analisis kebutuhan sistem usulan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran dari sistem yang telah dibuat.